

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut ditandai dengan beragamnya etnis, suku, agama, budaya, dan adat-istiadat yang terdapat di dalamnya.<sup>1</sup> Beragam masyarakat dengan latar belakangnya yang berbeda dan unik tersebut menjadi sebuah keniscayaan dan realita bangsa Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke (Barat ke Timur) berbagai kebudayaan yang beragam mengenai penduduk Indonesia melingkupi kehidupan masyarakatnya. Kebudayaan bangsa Indonesia yang beragam dan unik tersebut, di satu sisi, berpotensi menjadi kekuatan yang bisa menyatukan dan memperkaya bangsa Indonesia itu sendiri. Sebaliknya kemajemukan dan kebudayaan yang beragam tersebut berpotensi pula menjadi bahaya laten yang dapat mengancam integrasi bangsa Indonesia apabila tidak dikelola dengan baik. Beberapa contoh konflik sosial yang terjadi di masyarakat merupakan bentuk nyata dari distintegrasi bangsa. Konflik sosial di Ambon,<sup>2</sup> Sampit,<sup>3</sup> Sampang<sup>4</sup> dan sebagainya adalah contoh konkrit dari bentuk disintegrasi. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru PAI di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011), 13

<sup>2</sup> Salah satu konflik yang terjadi di Ambon, Maluku terjadi pada tahun 2011. Lihat *Kerusuhan Ambon 2011*, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan\\_Ambon\\_2011](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Ambon_2011), diakses pada tanggal 21 April 2018.

<sup>3</sup> Konflik Sampit terjadi pada tahun 2001. Lihat *Konflik Sampit*, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Konflik\\_Sampit](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Konflik_Sampit), diakses pada tanggal 21 April 2018.

<sup>4</sup> Konflik sampang terjadi tahun 2011, lihat konflik sampang <https://nasional.sindonews.com/read/667841/18/konflik-sunni-syiah-di-madura-1346103220> diakses 21 April 2018

berbagai upaya dilakukan untuk menjembatani, meminimalisir, dan mengelola berbagai perbedaan budaya yang ada di masyarakat.

Perbedaan kebudayaan yang disebutkan dikenal dengan istilah multikultural. Multikultural secara sederhana berarti kebudayaan yang beragam. Multikultural tidak hanya menyangkut masalah SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), melainkan keragaman yang lebih luas seperti kemampuan fisik maupun nonfisik, umur, status sosial, dan sebagainya. Kehidupan masyarakat yang multikultur perlu dipupuk agar muncul kesadaran pentingnya semangat multikulturalisme dalam kehidupan setiap individu dan masyarakat dalam melihat dan memaknai segala perbedaan. Multikulturalisme merupakan sebuah konsep atau ide yang menekankan pada adanya keanekaragaman kebudayaan dalam kesedarajatan atau kesetaraan.<sup>5</sup> Kesetaraan inilah yang menjadi titik tekan dari multikulturalisme. Setiap individu maupun masyarakat diperlakukan sama, tidak ada diskriminasi dan pengebirian hak-hak. Oleh karena itu, penting kiranya dikemukakan sebuah kesadaran dalam melihat dan memaknai perbedaan sebagai sesuatu yang lumrah dan manusiawi dalam kehidupan. Persepsi yang dibangun bukanlah berdasarkan kepentingan kelompok, golongan atau pandangan dari satu sisi, melainkan atas dasar semangat kemanusiaan dan kesetaraan.

Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

---

<sup>5</sup> Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme*, ...., 13

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Pendidikan sebagai salah satu wadah pembinaan dan pengembangan diri generasi muda merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Melalui dunia pendidikan segala potensi, minat, bakat, dan kemampuan generasi muda dipupuk dan dikembangkan sebagai bekalnya sekarang dan masa yang akan datang, termasuk dalam memahami, menghadapi, dan mengalami segala perbedaan (kemajemukan) yang ada.

Dalam era globalisasi ini, masyarakat Indonesia menginginkan adanya masyarakat yang baru dengan terwujudnya kemajuan, kesejahteraan, kebahagiaan, keterbukaan, keadilan, saling menghormati, dan menghargai. Dalam masyarakat ada penegak hukum yang adil, hak manusia yang di hargai, sehingga tercipta bangsa yang aman dan sejahtera. Dengan demikian masyarakat yang seperti itu disebut pula dengan istilah masyarakat madani.<sup>7</sup>

Pendidikan demokratis merupakan paradigma pendidikan yang harus dikembangkan di era globalisasi ini. Dalam hal ini pendidikan yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi antara lain pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat, kebebasan untuk mengaktualisasikan diri-sendiri, pendidikan yang membangun moral, yang pada akhirnya mengantarkan peserta didik semakin dekat kepada sang pencipta.<sup>8</sup>

Dengan demikian model pendidikan yang dibutuhkan adalah model pendidikan yang demokratis, partisipatif, dan humanis. Dengan adanya suasana

---

<sup>6</sup> Depdiknas, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, 2003), 65

<sup>7</sup> Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran Yang Demokratis & Humanis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), 151

<sup>8</sup> *Ibid . . .* , 155

yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat atau berbicara, kebebasan mengungkapkan gagasan, adanya keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas sekolah, kemampuan hidup bersama-sama dengan teman-teman yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>9</sup>

Pendidikan demokratis merupakan paradigma baru dalam pendidikan. Dikarenakan istilah demokrasi lebih cenderung kepada konsep sebuah negara yakni kedaulatan di tangan rakyat. Namun apabila demokrasi dikaitkan dengan pendidikan maka hal ini sejalan dengan hakikat dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Sejalan dengan pernyataan dari Ramayulis yakni mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif, sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.<sup>10</sup>

Proses pendidikan demokrasi bertujuan untuk pengembangan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan untuk pribadi yang mandiri merupakan suatu proses untuk mengembangkan akal budinya supaya pribadi tersebut dapat mengambil keputusan sendiri yang berarti pula mempertajam kemampuan rasionya untuk menimbang-nimbang dan mengambil keputusan.<sup>11</sup>

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ngainun Naim dan Achmad Syauqi “Demokratisasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai

---

<sup>9</sup> Depdiknas, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . . .*, 14

<sup>10</sup> Ramayulis, *Dasar-Dasar Kependidikan Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 312

<sup>11</sup> Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional, :Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 123

pembebasan pendidikan dan manusia dari struktur dan sistem perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen.<sup>12</sup>

Dengan demikian peserta didik akan mendapatkan hak-haknya untuk menyampaikan suatu ide dan pendapat, mandiri serta ruang kebebasan untuk berekspresi mengembangkan minat dan bakat, selama hal tersebut bernilai positif dan bisa dipertanggung jawabkan. Kemudian diharapkan akan terjadi proses kesetaraan antara pendidikan dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga akan menghasilkan seorang yang kreatif, kritis dan produktif serta profesional.

Menurut John Dewey, bahwasannya untuk mewujudkan pendidikan demokratis haruslah dimulai dari sekolah. Sebab, sekolah merupakan ujung tombak pendidikan. Sekaligus sebagai institusi yang sangat penting dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan.<sup>13</sup>

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang paling berperan penting dalam dunia pendidikan adalah pondok pesantren, dimana pesantren merupakan lembaga keagamaan tradisional yang memberikan sumbangsih dalam aspek pendidikan.

Dalam dunia pendidikan nasional, pesantren atau pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Daya tahan pesantren dalam menghadapi gelombang perubahan telah diakui. Respon pesantren terhadap perubahan tidak berlangsung dengan cara yang spontan melainkan melalui penyaringan-penyaringan. Pesantren di Indonesia berhasil melakukan adaptasi

---

<sup>12</sup> Ngainun Naim & Achmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008). 61

<sup>13</sup> Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran Yang Demokratis & Humanis . . .*, 159

dengan perubahan lingkungannya. Dinamika pesantren ditopang dengan dukungan masyarakat dan pemerintah yang peduli terhadap perkembangan pesantren,<sup>14</sup> selain karena adanya faktor lain. Pemerintah pun telah mengakui pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan, seperti dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 ayat 1 sampai 4.<sup>15</sup> Selain pemerintah, beberapa kalangan perguruan tinggi Islam pun menerapkan beberapa elemen pesantren, misalnya sistem asrama, sebagai wadah pembinaan bagi mahasiswa baru, seperti pengembangan kemampuan berbahasa asing, kebersamaan, dan sebagainya.

Dalam menghadapi perubahan yang semakin cepat berkembang, respon pesantren terhadap perubahan diwujudkan dengan melakukan antisipasi dan pembaharuan, seperti memasukkan ilmu-ilmu umum dan keterampilan-keterampilan dalam kurikulumnya, membuka madrasah dan sekolah, mendirikan koperasi, dan sebagainya.

Pondok pesantren sebenarnya tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian (*indigenous*) Indonesia, sebab keberadaannya mulai dikenal di nusantara pada periode abad ke 13-17 M, dan di Jawa dikenal pada abad ke 15-16 M.<sup>16</sup> Pada dasarnya pesantren merupakan suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam yang

---

<sup>14</sup> Badrus Sholeh dan Abdul Mun'im DZ, "Perdamaian dari Lokal ke Global: Tantangan Pesantren," dalam Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), 133

<sup>15</sup> UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>16</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Global: Resistensi Tradisional Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 5

didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen,<sup>17</sup> dalam arti selama santri tersebut belajar di pesantren. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pesantren juga melakukan beberapa perubahan dan perkembangan dalam sistem pendidikannya, di samping itu tetap mempertahankan ciri khas kepesantrenannya.

Jika melihat sistem pendidikan yang diterapkan, pendidikan di pesantren lebih berorientasi teosentris, sementara sistem pendidikan nasional berorientasi pada antroposentris.<sup>18</sup> Umumnya aktivitas atau pelajaran yang ada di pesantren berorientasi pada kepentingan ibadah teosentris. Kegiatan pesantren yang berlangsung selama 24 jam tidak hanya terjadi di dalam kelas namun juga di luar kelas atau di lingkungan kompleks pesantren. Interaksi antar masyarakat pesantren (kyai/pengasuh/mudir, pengurus-ustaz-ustazah, dan santri) berlangsung selama sehari semalam.

Jika dilihat tipologinya, maka pesantren mempunyai karakter yang plural, tidak seragam, dan tidak memiliki wajah tunggal (*uniform*). Hal ini ditunjukkan dengan tiadanya sebuah aturan yang menyangkut manajerial, administrasi, birokrasi, struktur, budaya, kurikulum sampai pemihakan politik.<sup>19</sup> Komunitas pesantren, menurut Abdurrahman Mas'ud, adalah bagian dari masyarakat Sunni atau *ahlu as-sunnah wa-l-jama'a* (aswaja) yang didefinisikan sebagai mayoritas muslim yang menerima otoritas sunnah rasul atau seluruh generasi pertama (sahabat) serta keabsahan sejarah komunitas muslim.<sup>11</sup>

---

<sup>17</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 2.

<sup>18</sup> *Ibid*, ..., 66

<sup>19</sup> *Ibid*, . . . , 67

Dari hal tersebut dapat diambil satu pemahaman bahwa pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting bagi upaya pencegahan terjadinya konflik-konflik bernuansakan perbedaan. Namun demikian, di lain sisi, pendidikan agama ini juga bisa menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja jika pendidikan agama yang diberikan ternyata bernuansa eksklusif, seperti yang telah diuraikan di atas.

Kaitannya dengan kegagalan pendidikan agama dalam mencetak pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran multikultural ini menurut Kautsar Azhari Noer, seperti yang dikutip oleh Ali Maksum,<sup>20</sup> disebabkan beberapa hal. *Pertama*, penekanannya pada proses transfer ilmu agama ketimbang pada proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak didik; *kedua*, sikap bahwa pendidikan agama tidak lebih dari sekedar sebagai hiasan kurikulum belaka, atau sebagai pelengkap yang dipandang sebelah mata; *ketiga*, kurangnya perhatian untuk mempelajari agama-agama lain; dan *keempat*, kurangnya penekanan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antar agama, seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, suka menolong, suka damai dan toleransi.

Pondok Pesantren Sunan Drajat yang terletak di desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan termasuk salah satu pesantren terbesar di Indonesia, dalam uraian selanjutnya PPSD Lamongan dipilih sebagai obyek penelitian ini. Akan tetapi fokus penelitian kami pada Kajian Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi pada Santri di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan.

---

<sup>20</sup> Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme,...*, 204

Inilah diantara fakta dan fenomena yang ada pada acara Beda tapi Mesra. Itulah tema yang diusung dalam acara yang diselenggarakan di pondok pesantren Sunan Drajat (16/12/2017). Perbedaan bukanlah menjadi penghalang untuk saling mengenal dan saling mengasihi satu sama lain. Terbukti pada acara yang dihadiri berbagai tokoh lintas agama. Silaturahmi ini hanya mempunyai satu tujuan yakni menghadirkan kedamaian dan tradisi toleransi di Indonesia melihat beragamnya budaya dan agama yang ada di Indonesia mulai dari suku, agama, adat, dan ras. kedatangan berbagai tokoh ini disambut hangat oleh keluarga besar di pondok pesantren Sunan drajat. Dengan suguhan berbagai rangkaian acara yang berlangsung dengan khidmad dan lancar tentunya. Beliau juga menerangkan berbagai aset pesantren dan juga sejarahnya.<sup>21</sup>



Para pemuka dari masing-masing agama telah menerima sorban hijau sebagai tanda telah menjadi keluarga besar di pondok pesantren Sunan Drajat yang langsung diberikan oleh K.H. Abdul Ghofur kepada, KH. Ahmad Suyanto (Islam), Pendeta Robert (Kristen), Edi Tarmidzi (Budha), Lien (Kong Hu Cu), Mardikim (Aliran Sapta Darma), Susatyo (Hindu). Beliauah perwakilan dari setiap agama yang menerima simbolis kekeluargaan di pondok pesantren Sunan Drajat. Dalam hal ini terdapat nilai demokrasi yakni nilai kesamaan di depan

---

<sup>21</sup><https://ppsd.or.id/beda-tapi-mesra-kunjungan-lintas-agama-di-pondok-pesantren-sunan-drajat-lamongan/>, diakses tanggal 01 Januari 2019 Jam 13.00 WIB.

hukum di NKRI , K.H Abdul Ghofur mengatakan bahwasannya santri berpotensi besar bagi bangsa Indonesia terlebih dalam hal penyebar kedamaian antar umat beragama yang disatukan oleh manusia.

Alasan pemilihan PPSD Lamongan sebagai obyek penelitian ini didasarkan pada suatu fakta bahwa adanya keterlibatan banyak pihak dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum di PPSD Lamongan. Keterlibatan banyak pihak ini memungkinkan adanya muatan nilai-nilai demokrasi. Dikarenakan PPSD Lamongan ini mempunyai tradisi untuk merencanakan program kurikulum dalam bentuk musyawarah kerja dan diskusi kelompok. Dalam hal ini ada beberapa pesantren antara lain : Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan, Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin Suci Manyar Gresik dan Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban, dengan mendasarkan pada visi, misi, dan asal usul daerah santri. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah kerja ini antara lain dari yayasan, pengurus pondok pesantren dan beberapa pendidik yang terlibat yang memiliki kapasitas dalam bidang pengembangan kurikulum. Dan setiap peserta musyawarah kerja memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapat pada forum musyawarah kerja tersebut.<sup>22</sup> Nilai demokrasi dapat dilihat dari banyaknya keterlibatan dari berbagai unsur di Pondok Pesantren Sunan Drajat. Nilai keadilan juga dapat dilihat dalam pemberian hak yang sama dalam menyampaikan pendapat pada waktu musyawarah kerja dimulai, sehingga tercipta iklim yang demokratis, menyenangkan dan penuh tanggung jawab.

Di samping itu, pengembangan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat

---

<sup>22</sup> Ahmad Sulton, “ Kurikulum Pesantren Multikultural : Nilai-Nilai Multikultural dalam Kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan”. *Ulul Albab*. Vol. 16 No. 1, 2015, 11

didasarkan pada tiga hal, yaitu: 1) visi dan misi, 2) asal usul daerah santri, 3) minat, bakat dan keahlian santri. Aspek asal usul daerah santri sangat dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat, dapat dilihat dari keberadaan organisasi-organisasi perkumpulan daerah yang memberikan ruang ekspresi santri yang berasal dari daerah yang sama, baik ekspresi yang terkait dengan Bahasa, adat istiadat maupun budaya. Selanjutnya aspek minat, bakat, dan keahlian santri dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan dapat dilihat dari keragaman satuan pendidikan yang diselenggarakan : Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Muallimin Muallimat (MMA), dan Insitut Sunan Drajat (INSUD). Dan pada ekstrakurikuler baik yang ada di pesantren maupun sekolah formal dan keragaman jenis program pendidikan yang ada pada satuan pendidikan seperti program kelas regular, program kelas unggulan, program kelas khusus agama menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek minat, bakat dan keahlian para santri di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan.<sup>23</sup> Disini nilai demokrasi terdapat pada santri diberi ruang bebas memilih sesuai dengan minat dan bakat dan pemberian ruang yang sama dalam mengekspresikan bahasa serta budaya sesuai daerah masing-masing santri tersebut. Dalam proses pembelajaran guru sering juga mempertimbangkan aspirasi dan usul peserta didik dalam hal tempat pembelajaran. Guru yang bijak mengalihkan tempat pembelajaran diluar kelas, baik di halaman, perpustakaan maupun masjid. Dalam hal ini guru memiliki sikap demokratis untuk pemilihan

---

<sup>23</sup> Ibid, Ahmad Sulon, " Kurikulum Pesantren Multikultural . . . , 12

tempat pembelajaran, guna menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sikap demokratis guru juga ditunjukkan pada interaksi antara guru dan peserta didik. Sikap demokratis dapat dilihat dari peluang yang diberikan kepada peserta didik untuk membentuk kelompok, mengajukan pertanyaan dan mempresentasikan materi kepada sesama peserta didik. Dan peluang tersebut diberikan kepada semua peserta didik tanpa melihat asal usul daerah peserta didik tersebut.

Dari uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan, dan untuk memudahkan dan terarahnya penelitian, peneliti merumuskannya dalam judul penelitian sebagai berikut Internalisasi Nilai-Nilai Demokrasi pada Santri di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- 1.2.1 Nilai-Nilai demokrasi di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan belum diketahui.
- 1.2.2 Implementasi nilai-nilai demokrasi di Pondok Pesantren Sunan Drajat lamongan belum diketahui.

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa saja nilai-nilai demokrasi di Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran Lamongan?

- 1.3.2 Bagaimanakah implementasi nilai-nilai demokrasi di Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran Lamongan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini diantaranya:

- 1.4.1 Untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan.
- 1.4.2 Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai demokrasi di Pondok Pesantren Sunan Drajat lamongan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap dunia pendidikan. Adapun secara detail, manfaat penelitian ini diantaranya:

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- 1.5.1.1 Pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi tentang internalisasi nilai-nilai demokrasi di Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran Lamongan.
- 1.5.1.2 Peneliti sendiri, sebagai tambahan khazanah keilmuan baru berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai demokrasi di pondok pesantren.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- 1.5.2.1 Memberikan sumbangsih terhadap pemecahan konflik-konflik yang didasari atas perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia.

1.5.2.2 Sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya.

## **1.6 Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah dalam tesis ini, maka penulis memberikan pembatasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini, diantaranya:

### **1.6.1 Internalisasi Nilai**

Intenalisas adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku . Sedangkan nilai adalah segala sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek,menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Sehingga maksud dari penanaman nilai dalam penelitian ini adalah suatu proses menamakan suatu nilai dipentingkan manusia, sehingga nilai tersebut dapat diwujudkan dalam sikap dan prilaku.

### **1.6.2 Demokrasi**

Demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.

Jadi, yang dimaksud dengan penanaman nilai-nilai demokrasi di sini adalah proses menanamkan suatu nilai pada santri terkait dengan abstraksi atau pandangan tentang demokrasi sehingga nilai tersebut dapat diwujudkan dalam sikap dan prilaku. Dalam hal ini abstraksi tersebut dipadu samakan

dengan pendidikan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh latar belakang santri baik dalam hal etnis, ras, suku dan budaya . Nilai-nilai Demokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi (1) Rasa Hormat Terhadap Harkat Sesama Manusia (2) Pluralisme yaitu penghargaan atas sebuah bakat, minat, keinginan dan pandangan (3) Rela Berbakti untuk Kepentingan dan Kesejahteraan Bersama .